



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG 2026



bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan LKPJ ini akan digunakan sebagai data dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong.

Namun demikian sangat disadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menggambarkan hasil capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Tanjung, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	1
A.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
A.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	6
A.3 Jumlah pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan fungsional	9
B. Perencanaan Pembangunan	10
B.1 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029	10
B.2 Strategi dan Arah Kebijakan	12
B.3 Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	16
C. Prioritas Pembangunan	16
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	20
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025	20
A.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	20
A.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama DLH	27
B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	29
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	31
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	30
B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan	30
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan	30
D. Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak lanjut)	32
BAB IV CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	33
BAB V PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kemudian disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja anggaran yang disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 2 bahwa Lingkungan Hidup termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

A.1. Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah

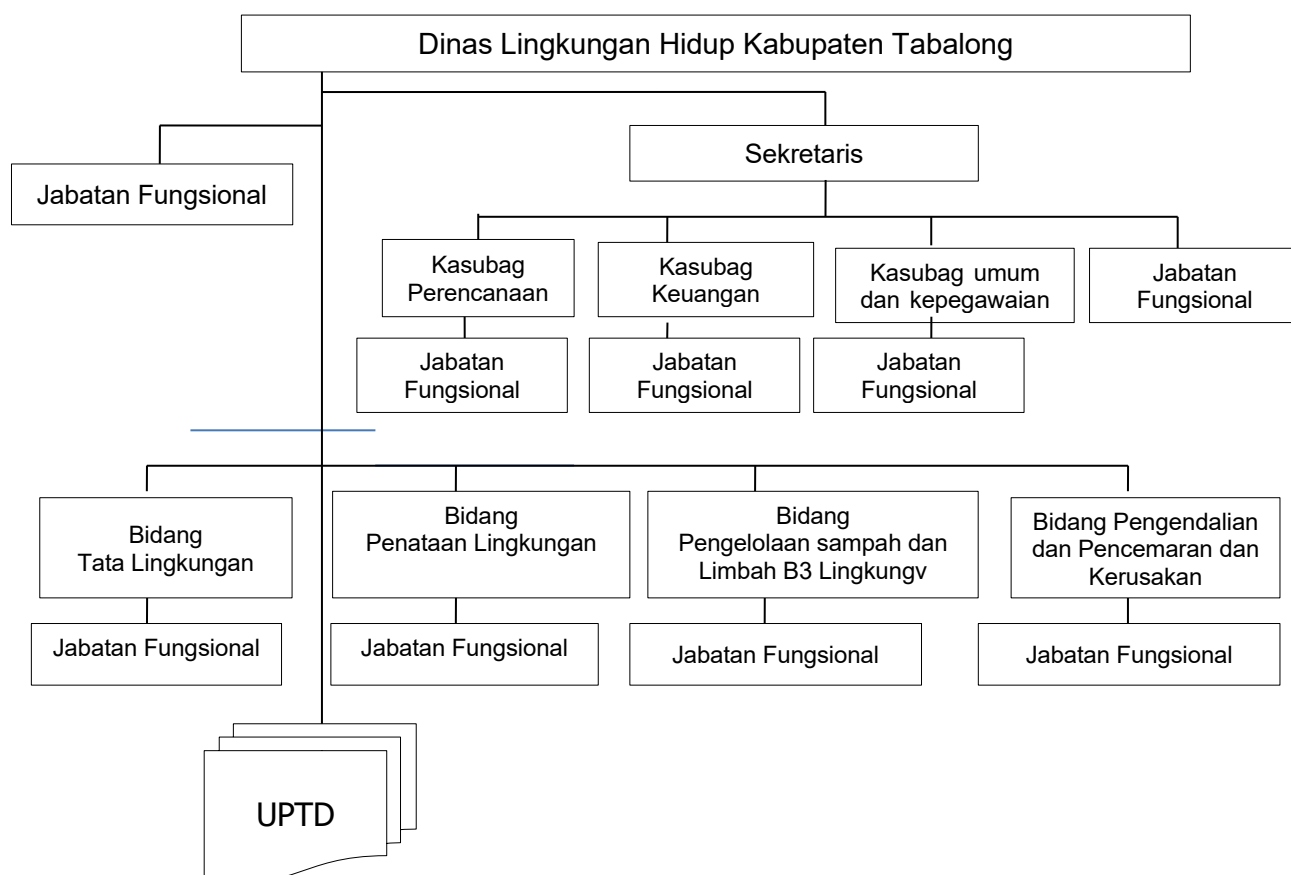
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan daerah nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanan administrasi Bidang Lingkungan Hidup
- e. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanan administrasi Bidang Lingkungan Hidup

- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur – unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1. Sekretariat
- 2. Bidang Tata Lingkungan
- 3. Bidang Penataan Lingkungan
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 6. UPTD
- 7. Jabatan Fungsional

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub bagian Perencanaan
- b. Sub bagian Keuangan
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi :

- a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup Dinas dan instansi terkait.
- c) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

3. Bidang Tata Lingkungan

- a) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan

menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
4. a) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- a) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
6. Bidang Penataan Lingkungan

- a) Bidang Penuaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Penuaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penuaan Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penuaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penuaan Lingkungan.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penuaan Lingkungan.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Penuaan Lingkungan.

Organisasi Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Perencanaan.
 - b. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan dokumen perencanaan lainnya.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada sub bagian perencanaan.
 - e. Melakukan penyiapan dan penyampaian rancangan standar operasional prosedur di bidang perencanaan.
 - f. Menyiapkan bahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Keuangan.
 - b. Melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, paenatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
 - c. Menyiapkan dan meneliti usulan permintaan biaya serta pembayaran.
 - d. Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja secara berkala, perhitungan realisasi belanja dan laporan akhir tahun.
 - e. Menyiapkan dan megerjakan pembukuan, pengujian bukti pembayaran yang sah,

pencatatan transaksi SPM giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas.

f. Mencatat, menyetor, dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan SOP dibidang Umum dan Kepegawaian
- b. Melakukan urusan surat menyurat
- c. Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- e. Pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi
- f. Pengeloaan urusan administrasi kepegawaian

A.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

*Tabel A.2.1
Inventarisasi Tanah*

No.	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (m ²)	diperuntukkan
Tanah				
1	Tanah	Kelua	15.000	Tempat Pengelolaan Sampah
2	Tanah	Maburai	23.233	
3	Tanah	Muara Uya	17.000	
4	Tanah	Murung Pudak	225	
5	Tanah	Tanjung	400	
6.	Tanah	Bongkang Haruai	127.790	

Data : Bendahara Barang s/d Desember 2025

*Tabel A.2.2
Inventarisasi Peralatan dan Mesin*

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
Alat / Armada Angkut		
1	Buldozer	2
2	Excavator	2
3	Dump Truck	34
4	Mini Bus	6
5	Pick Up	6
6	Sepeda Motor	15
7	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga	13
8	Gerobak Tarik	12
9	Bak Amroll	14

	Alat Ukur	
10	Mesin Kompresor	1
11	Global Positioning System (GPS)	2
	Alat Pertanian	
12	Chain Saw	
13	Alat Pengukur Curah Hujan	
14	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
15	Mesin Ketik Manual Portable	1
16	Mesin Ketik Manual Standar	1
17	Mesin Penghitung Uang	1
18	Lemari Besi	6
19	Filling Besi/Metal	20
20	Brand Kas	1
21	Lemari Kaca	7
22	Lemari kayu	8
23	Rak Kaca	1
24	Alat Penghancur Kertas	1
25	Papan Nama Instansi	1
26	Papan Pengumuman	5
27	White Board	1
28	Genset	2
29	Mesin Pompa Air	4
30	Kursi Besi/Metal	7
31	Meja Rapat	9
32	Meja Tulis	18
33	Kursi Rapat	40
34	Kursi Tamu	10
35	Kursi Putar	19
36	Meja Komputer	5
37	Kursi Kerja	20
38	Gordyn	1
39	Karpet	4
40	Mesin Potong Rumput	13
41	AC Split	18
42	Exhaust Fan	4
43	Dispenser	9
44	Televisi	14
45	Loudspeaker	3
46	Camera Video	1
47	Alat Pemadam Portable	4
48	P.C Unit/ Komputer PC	2
49	Lap Top	33
50	Note Book	13
51	CPU	1
52	Plotter	1
53	Monitor	3
54	Printer	21
55	UPS	5
56	Harddisk Eksternal	9
57	Webcam	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
64	Kursi Rapat	

	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
65	Proyektor + Attachment	1
66	Microphone/Wireless Mic	1
67	Handycam	2
68	Camera Electronic	4
69	Telephone (PABX)	1
70	Handy Talky	2
71	Facsimile	1
	Alat Laboratorium	
72	Diesel Smoke Meter	1
73	Thermohygrometer	1
74	Botol D.O	20
75	Condensor	1
76	Alat Sampling Gas Buang	1
77	Autoclave Unit	1
78	Refrigerator	1
79	Micro Pippetes	4
80	Spectrophotometer	1
81	Desicator	1
82	Buret/Peralatan Titrasi	1
83	Titration	1
84	Cooler	2
85	Baumeter	1
86	Anemometer	1
87	COD Monitor	1
88	Hot Plate Stirrer	1
89	Hand Auger Kit	7
90	Botol Pencuci	5
91	Thermometer Kamar	1
92	Atomic Absorption Spechtrophotometer	1
93	PH Meter/Indicator And Ion Meter	1
94	Conductivity Meter	1
95	Salino meter	1
96	TOC Analyzer	1
97	Oil Analyzer	1
98	Turbidi Meter	1
99	Water Quality Analyzer System	1
100	Test Kit	1
101	Plankton Net	1
102	Water Sample	1
103	Eckman - Berge Dredge	1
104	Dust Sampler	1
105	Air Polution Ozon Analyzer	1
106	Vehicle Emission Gas analyzer	1
107	Hydrogen Gas Generator	1
108	Precision Intregating Sound Level Meter	1
109	Vibration Level Meter	1
110	UV/VIS Spectrophotometer	1
111	Centrifuge	1
112	Multi Fumace	1
113	Electric Oven	1
114	BOD Incubator	1
115	Flow Meter	1
	Alat-alat Keamanan	
116	CCTV	8

Data Bendahara Barang s/d Desember 2025

A.3. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sesuai data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2025 bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

*Tabel A.3.1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong*

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65 orang
2.	P3K	16 orang
3.	Non PNS terdata dalam data base BKN	27 orang
4.	Non PNS terdata di SIMPEG	524 orang
	Jumlah	632 orang

*Tabel A.3.2
ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Jenjang Pendidikan*

No.	Pendidikan	Jenis kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	6 orang	6 orang	12 orang
2.	Strata 1 (S1)	2 orang	3 orang	5 orang
3.	Sarjana Muda (D3)	3 orang	4 orang	7 orang
4.	SLTA/ sederajat	19 orang	4 orang	23 orang
5.	SLTP/ sederajat	7 orang	0 orang	7 orang
6.	SD/ sederajat	9 orang	0 orang	9 orang
	Jumlah	46 orang	17 orang	63 orang

*Tabel A.3.3
ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang*

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis kelamin		Jumlah
			Laki - Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1 orang	0 orang	1 orang
	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Pembina	(IV/a)	4 orang	3 orang	7 orang
3.	Penata Tk. I	(III/d)	3 orang	5 orang	8 orang
4.	Penata	(III/c)	0 orang	1 orang	1 orang
5.	Penata Muda Tk. I	(III/b)	3 orang	2 orang	5 orang
6.	Penata Muda	(III/a)	17 orang	9 orang	26 orang
7.	Pengatur Tk. I	(II/d)	2 orang	0 orang	2 orang
8.	Pengatur	(II/c)	10 orang	0 orang	10 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	2 orang	0 orang	2 orang
10.	Pengatur Muda	(II/a)	7 orang	2 orang	9 orang
11.	Juru Tk. I	(I/d)	6 orang	0 orang	6 orang
11.	Juru	(I/c)	2 orang	0 orang	2 orang
	J u m l a h		56 orang	25 orang	81 orang

Tabel A.3.4
Jumlah Pejabat Struktural

No.	Jabatan struktural	Eselon	Jenis kelamin		
			Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	3 orang	1 orang	4 orang
4.	Kepala Sub bagian	Eselon IV	0 orang	3 orang	3 orang
5.	Kepala UPTD	Eselon IV	4 orang	2 orang	6 orang
6.	Kepala Subag UPTD	Eselon IV	1 orang	1 orang	2 orang
		Jumlah	10 orang	7 orang	17 orang

Tabel A.3.5
Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pengendali dampak lingkungan	0 orang	2 orang	2 orang
2.	Pejabat pengawas lingkungan hidup	1 orang	1 orang	2 orang
3.	Penyuluh lingkungan hidup	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	1 orang	4 orang	5 orang

Tabel A.3.6
Jumlah P3K

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pengendali dampak lingkungan	2 orang	1 orang	3 orang
2.	Pranata komputer	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Penata layanan Operasional	5 orang	6 orang	11 orang
4.	Pengelola Layanan Operasional	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	8 orang	8 orang	16 orang

B. Perencanaan Pembangunan

B.1. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mengacu langsung pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabalong terpilih Periode 2025 - 2029 yaitu ***Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)*** dengan makna sebagai berikut :

- ***Kabupaten Tabalong Sejahtera,***

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil

- *Kabupaten Tabalong Maju,*
Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
- *Kabupaten Tabalong Religius,*
Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan
- *Kabupaten Tabalong Terdepan,*
Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Atau dengan makna secara keseluruhan, "TABALONG SMaRT" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama. Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

- 1 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
- 2 Mendorong Kemajuan Daerah
- 3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius
- 4 Menjadi Daerah yang Terdepan

Sesuai amanat dalam RPJMD misi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yaitu misi kedua ***Mendorong Kemajuan Daerah*** melalui sasaran ***Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan***.

Berdasarkan misi yang harus diemban maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan yaitu "***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup***".

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang ingin dicapai maka diuraikan melalui sasaran, secara rinci sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Indeks kualitas air dan udara
- 2 Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 3 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
- 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kinerja Perangkat Daerah

B.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain adalah :

- Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Meningkatkan pengelolaan persampahan
- Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
- Meningkatkan tata kelola dan perencanaan lingkungan hidup
- Meningkatkan pengawasan, ketaatan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
- Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
- Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan
- Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium
- Peningkatan Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
- Peningkatan prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian, perlindungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan persampahan
- Peningkatan penanganan persampahan
- Peningkatan kebijakan, rencana dan program dalam pembangunan yang berkelanjutan
- Peningkatan pelayanan dalam proses persetujuan lingkungan

- Peningkatkan upaya Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- Optimalisasi pemungutan retribusi persampahan/kebersihan
- Peningkatan regulasi bidang lingkungan hidup
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk ramah lingkungan
- Aksi Penanaman pohon
- Pembentukan bank sampah
- Sosialisasi / penyuluhan kepada Masyarakat / kelompok Masyarakat / komunitas / Lembaga Pendidikan terkait pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah
- Peningkatan Pembangunan TPS 3R/TPST
- Pembentukan kampung iklim
- Melakukan analisis GAP, GBS pada program kegiatan sub kegiatan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persetujuan Lingkungan Penegakan hukum lingkungan	- Mengoptimalkan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah sehingga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	- Peningkatan ketersediaan dokumen lingkungan hidup Pembinaan dan - pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Pengawasan terhadap izin - lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah	
	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Mendorong perlindungan kawasan hutan dan ekosistem alami. Mendorong penggunaan air secara bijak, pengembangan energi terbarukan. Melaksanakan kordinasi dan dukungan program perbaikan lahan yang mengalami degradasi akibat deforestasi, pertambangan, atau pertanian yang tidak ramah lingkungan	- Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau - Peningkatan pengelolaan kebun raya - Peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati - Peningkatan Upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	
	Pengelolaan Lingkungan	Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup melalui kampanye pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pelestarian lingkungan.	- Peningkatan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah - Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pembinaan Masyarakat hukum adat - Pembinaan kampung iklim	
	Pengelolaan Persampahan	- Menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan	- Peningkatan pengelolaan sampah melalui TPS 3R - Pembinaan bank sampah	

		alternatif ramah lingkungan. Membangun fasilitas pengolahan sampah modern, termasuk bank sampah. Mendorong pelaku industri memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar lingkungan.	Sosialisasi pengelolaan sampah	
		Mendorong industri dan transportasi untuk menggunakan teknologi rendah emisi dan energi bersih. Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lingkungan. Mendorong urban forestry, taman kota, serta penghijauan lahan pertanian untuk meningkatkan daya serap karbon.		

Selanjutnya keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Visi : Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)			
Misi : Mendorong Kemajuan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan
			Peningkatan Penanggulangan pencemaran lingkungan
			Peningkatan upaya Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
			Peningkatan kapasitas laboratorium
			Meningkatkan Pembinaan Kampung iklim
			Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
			Identifikasi sumber pencemar
			Sosialisasi / penyuluhan / pemberian informasi pencegahan /penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Meningkatkan Ketaatan pelaku usaha kegiatan dalam PPLH	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
			Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup
			Peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam PPLH	Peningkatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah
			Pembinaan masyarakat hukum adat
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Meningkatkan perencanaan lingkungan hidup	Peningkatan ketersediaan dokumen lingkungan hidup

		Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
			Peningkatan pengelolaan kebun raya
			Membangun taman keanekaragaman hayati
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Peningkatan prasarana dan sarana persampahan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Peningkatan pengelolaan TPA
			Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
			Pembinaan bank sampah
			Sosialisasi / penyuluhan tentang pengelolaan sampah

B.3. Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong menetapkan program-program yang akan dilaksanakan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dan rencana kerja tahun 2025 sesuai bidang urusan pemerintah.

Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 melalui 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten

C. Prioritas Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Program dan Kegiatan merupakan implementasi dalam menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagai upaya mendukung pencapaian program prioritas Bupati Tahun 2025.

Adapun daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel C.1.

*Sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2				Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
3			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
5				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
6				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
7				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
8				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
9				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
10				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
11			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
13				Pengelolaan Kebun Raya
14				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
15				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
16	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
17				Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
18	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Meningkatkan kepatuhan regulasi bidang lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 2
19				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5
20	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Meningkatnya partisipasi dan edukasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
21	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan edukasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
22	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Meningkatkan kepatuhan regulasi bidang lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
23	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Penanganan sampa	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
24				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
25				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

A.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	360.142.000	1 dokumen	330.780.565	2 dokumen	- Kesulitan mencari data sehingga inventarisasi tidak tepat waktu	- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu data
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Peninjauan Kembali Terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	251.497.000	1 dokumen	234.705.170	1 dokumen	- Kesulitan mencari data sehingga inventarisasi tidak tepat waktu	- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu data
2	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis	penyelenggaraan KLHS Rencana tata ruang	661.049.000	2 dokumen KLHS RDTR	356.051.980	1 dokumen KLHS RDTR	- KLHS RDTR menunggu hasil Dokumen materi teknis dari PUPR	- Meningkatkan koordinasi dengan PUPR
3	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	128.950.575	1 dokumen	128.058.000	1 dokumen	- Pemenuhan data dari sektor lain	- Meningkatkan koordinasi bekerjasama dengan universitas sebagai jasa konsultan
4	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	275.714.000	35 lokasi	204.002.091	35 lokasi	- Terdapat parameter baku mutu yang belum terpenuhi terutama disebabkan limbah domestik	Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membuang langsung limbah ke sungai

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	321.318.220	50 laporan	303.383.681	50 laporan	Masih perlu peningkatan aksi mitigasi sesuai dengan rencana aksi daerah perubahan iklim	Meningkatkan aksi Upaya mitigasi sesuai dengan rencana aksi daerah dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim
6	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	236.341.075	1 dokumen	135.453.245	1 dokumen	Merupakan informasi kinerja lingkungan hidup	Masih perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dan Masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan
7	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	375.297.080	5 laporan	354.281.500	5 laporan	Masih perlu peningkatan aksi adaptasi sesuai dengan rencana aksi daerah perubahan iklim	Meningkatkan aksi Upaya adaptasi sesuai dengan rencana aksi daerah dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim
8	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium	3.629.262.023	350 sampel	3.110.541.825	537 sampel	Masih perlu peningkatan kapasitas SDM dan manajemen lab	Meningkatkan diklat / bimtek /IHT dalam meningkatkan manajemen lab
9	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	169.491.500	2 laporan	152.775.578	2 laporan	sosialisasi masih terbatas kepada pelaku usaha kegiatan tertentu	Meningkatkan sosialisasi informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
10	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	146.502.000	1 dokumen	134.871.670	1 dokumen	Pemenuhan data dari sektor lain	Meningkatkan koordinasi bekerjasama dengan universitas sebagai jasa konsultan

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebun Raya	76.503.043	33 ha		33 ha	Lokasi kebun raya masih belum sepenuhnya menjadi asset pemda	Meningkatkan koordinasi dengan bagian asset dan Masyarakat yang masih memiliki lahan dilokasi kebun raya yang belum dibebaskan
12	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.249.473.581	850 ha	7.751.165.732	850 ha	Pelaksanaan Pembangunan RTH baru seringkali terkendala waktu sehingga keterlambatan pembayaran kepada penyedia	Menginformasikan untuk usulan Pembangunan rth tidak di renja perubahan asal Lokasi dan kepemilikan lahan milik pemda
13	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	457.923.000	1 unit	449.753.455	2 unit	belum ada penetapan lokasi taman keanekaragaman hayati sehingga pengelolaan kehati tidak bisa 100%	Akan berkoordinasi dengan baperida dan bidang asset untuk penetapan Lokasi taman kehati
14	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.628.000	5 dokumen	65.021.536	5 dokumen	Masih perlu sosialisasi dan pembinaan untuk tata cara perizinan penyimpanan sementara Lb3 dan pengelolaan limbah B3	Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepala pelaku usaha kegiatan untuk tata cara pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	418.184.237	1 unit	311.398.871	1 unit	Belum optimal operasional pada UPTD Limbah B3	Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
16	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	99.972.500	2 orang	96.539.953	2 orang	Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup sampai sekarang masih belum mencukupi	Sudah mengajukan usulan rekrutmen SDM PPLHD melalui BKPSDM dan kementerian teknis
17	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	148.401.760	30 badan usaha	129.404.954	32 badan usaha	Jumlah pejabat pengawas yang terbatas sementara pelaku usaha yang harus diawasi cukup banyak	- Mengusulkan penambahan pejabat pengawas LH - Meningkatkan kapasitas PPLHD yang ada - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan karena masih ada penanggungjawab pelaksana kegiatan yang belum taan melkaukan pengelolaan lingkungan

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	144.888.400	1 dokumen	137.181.100	1 dokumen	Belum selesai perda tentang pengakuan MHA	Masih dalam proses pembahasan
19	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	339.761.979	80 sekolah	259.401.240	113 sekolah	Semakin bertambah syarat dalam penetapan sekolah adiwiyata	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam pembinaan dan edukasi Gerakan peduli lingkungan di sekolah
20	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	98.726.500	10 pengaduan	66.431.160	13 pengaduan	Jumlah pengaduan terus meningkat	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha kegiatan terkait PPLH

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	12.332.250.139	60 unit	11.020.598.901	37	Belum memadai sarpras persampahan	Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan sarpras persampahan
22	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.344.445.560	10.000 ton	1.106.118.632	1.606,36	Masih kurang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan pembinaan dan pembentukan kelompok bank sampah - Pembangunan TPS 3R - Sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat tentang pengelolaan sampah
23	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona	6.119.401.875	36.000 ton	5.111.118.202	33.393	Pembangunan TPST di TPA masih belum terealisasi	Mengupayakan Pembangunan TPST pada tahun anggaran 2026 - Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA
24	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	25.200.000	8 dokumen	12.600.000	8 dokumen	Tertentu banyak permintaan data dengan tenggat waktu dan aplikasi yang tidak memudahkan	Berupaya memenuhi laporan tepat waktu

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	13.463.775.000	77 org / bln	10.879.600.511	69 orang	- Perubahan jumlah pegawai menyebabkan perubahan jumlah anggaran giatun	- Koordinasi dengan bidang anggaran
26	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.442.389.702	7 paket	1.298.988.250	7 paket	- Penambahan peralatan perlengkapan untuk menunjang kinerja	- Menginventaris kebutuhan barang sebelum usulan pengadaan BMD
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.322.000	26 laporan	269.056.794	26 laporan	- Banyaknya undangan dan kegiatan keluar daerah	- Menambah anggaran perjaldin biasa dan selektif melakukan perjaldin
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.424.756.345	12 laporan	13.564.795.995	12 laporan	- Perubahan peraturan untuk tenaga pelayanan umum	- Koordinasi dengan baperda dan bidang anggaran
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.130.000	30 unit	304.457.811	30 unit	- Perlu pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas / operasional	- Tersedia anggaran pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.900.000	10 unit	44.448.000	10 unit	- Perlu pemeliharaan rutin dan berkala	- Tersedia anggaran pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya
	Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan hidup	DPA DLH DPPA DLH	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.187.580.570	5 unit	642.126.548	5 unit	- Perbaikan / pengaspalan jalan masuk armada persampahan belum menyeluruh	- Akan dianggarkan pada rencana kerja yang akan datang

A.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi / Perhitungan		Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1	3	4		5	6	7	
1	Indeks Kualitas Air	$\sqrt{(Ci/Lij)^2 \text{rata rata} + (Ci/Lij)^2 \text{maksimum}}$		angka	69,19	74,34	
2	Indeks Kualitas Udara	$100 - ((50/0,9 \times (PU - 0,1)))$		angka	71,39	86,37	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$100 - ((84,3 (LTL/LW - DKK \times 100)) \times 50/54,3)$		angka	77,77	77,38	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Komponen	Bobot	angka	70	76,06	Nilai sementara pada penilaian adipura pertama masih menunggu upadate data pada aplikasi sistem pengelolaan sampah nasional (SIPSN)
		- Kebijakan	15%				
		- Sumber Daya Manusia	5%				
		- Sarana dan Prasaranan	5%				
		- (pengakutan dan pengolahan sampah)					
		- Anggaran	5%				
		- Sosialisasi dan Pemahaman	5%				
		- Implementasi	5%				
		- Capaian Terhadap Target	20%				
		- Efisiensi Anggaran	20%				
		- Kota Bersih	10%				
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	10%				

A.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1	3	5	6	7	
1	Persentase Jumlah Penanganan Sampah	persen	94,80	87,22	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh, dan puu yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Persen	75	87,5	

B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

*Tabel B.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap LKPJ Bupati Tabalong
Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2024*

Catatan Strategis	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tanggapan / Tindak Lanjut
1	2	3
1 Belum maksimalnya angkutan sampah hal ini terlihat masih banyaknya sampah yang menumpuk	- Penambahan dan pembagian angkutan sampah untuk seluruh wilayah secara merata dan sesuai dengan lokasinya.	- Dalam Anggaran Perubahan TA 2024 telah direalisasikan pengadaan 4 (empat) Unit Truck Pengangkut Sampah yang terdiri dari 2 Unit Dump Truck untuk peningkatan layanan wilayah utara 1 unit dan wilayah selatan 1 unit, sedangkan 2 unit lagi terdiri dari Arm Roll truck untuk mengganti 2 unit arm roll truck yang dari segi umur sudah tua, sering rusak dan biaya perawatan tinggi. Kedua Arm Roll Truck tersebut untuk meningkatkan layanan kawasan Perkotaan Khususnya wilayah Layanan Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak. Pada anggaran perubahan juga diterima hibah prestasi Adipura dari DLH Provinsi Kalsel sebanyak 1 unit Dump Truck Sampah sebagai spare unit dump truck yang mengalami kerusakan untuk wilayah perkotaan.
2 Terbatasnya SDM dalam pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup.	- Peningkatan dan pengawasan terhadap angkutan sampah baik perkotaan maupun pedesaan, serta perlunya penambahan SDM analisis dengan mengusulkan permintaan tenaga analisis.	- Pengajuan usulan penambahan SDM sesuai dengan Kelas Jabatan dan Formasi, melakukan evaluasi kebutuhan dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan formasi yang tersedia serta dilakukan pelatihan
3 Kurang tersedianya resapan air.	- Adanya resapan air sebagai media untuk menampung air hujan pada musim penghujan agar tidak terjadi bencana banjir dan mengendalikan kekeringan di musim kemarau.	- Memperbaiki secara fisik aliran air / sungai yang menjadi titik rawan banjir / pengendalian banjir - Menjadikan sungai / aliran air untuk berfungsi menjadi pengendali banjir (normalisasi) - Konservasi lahan (tanaman) untuk memperkuat daerah bantaran sungai (penanaman pohon spesifik) - Perlu adanya kajian / analisa kelayakan untuk penetapan daerah resapan Kota / Kecamatan

Catatan Strategis	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tanggapan / Tindak Lanjut
1	2	3
4 Perlunya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- RTH di semua wilayah sebagai media untuk resapan air untuk menurunkan suhu panas dan menciptakan kesejukan agar wilayah tetap asri.	- Persiapan lahan / lokasi di semua Kecamatan / Desa untuk dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Memelihara lahan lahan privat / masyarakat untuk difungsikan sebagai penghasil oksigen - Membangun Ruang Terbuka Hijau pada lokasi / lahan yang sudah siap - Memperkuat / pendukung untuk memelihara RTH termasuk operasional pemeliharaan - Persiapan lahan / lokasi di semua Kecamatan / Desa untuk dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten

Tabel 3.B.1
Gambaran umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025

No.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugas pembantuankan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.C.1.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2025

No	K / LNPK	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Tugas Pembantuan provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.C.2.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2025

No	Bidang urusan	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintah di Bawahnya (Pemerintahan Desa)

Tabel 3.C.2.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
yang Diberikan kepada Pemerintahan Desa Tahun 2025

No	Bidang urusan	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Desa Pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Hambatan / Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak Lanjut)

1. Permasalahan dan Kendala

-

2. Saran dan Tindak Lanjut

-

BAB IV

CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4.1. Capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025

Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Urusan Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	10	10	
Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	52,26		
	Indeks kualitas udara (IKU)	angka	96,78		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%	85		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	10	
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PU LH	%	90,30	75	87,5
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat HukumAdat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH					
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hakMHAYang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100

Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian kasus Sengketa/Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	90	100	100
Program Pengelolaan Persampahan					
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	77	70	76,06
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya kelancaran tujuan dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	%	n/a	100	100

4.2. Capaian kinerja atas pelaksanaan IKD Tahun 2025

Sementara untuk capaian pelaksanaan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tabalong sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target	Realisasi
1	3	5		
Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,98	79,88
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	2,36	2,58
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	62	95,30
4	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	persen	75	75
5	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	95	66,50
Aspek Pelayanan Umum				
1	Nilai SAKIP	kategori	B	A

Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	persen	9,30	12,5
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indeks	73,98	79,88
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	90,72	87,22

BAB V

PENUTUP

Laporan Kegiatan bidang Lingkungan Hidup ini disusun sebagai bahan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong untuk Bupati yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memuat laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progres report*) yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan terwujudnya *Good Governance*.

Laporan ini didalamnya memuat hasil – hasil tingkat capaian kinerja yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi selanjutnya.

Tanjung, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710928 200003 1 003

